
Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Lokal

Fahmi Widiyanto

Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Manggelewa Malang.
(Alamat Jl. Dawuhan, Karangploso, Malang, Indonesia)
*Corresponding author: fahmiwidiyanto2003@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi lokal serta partisipasi masyarakat terhadap demokrasi lokal. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah systematic literature review yang menggunakan 450 artikel ilmiah. Artikel-artikel ini berasal dari jurnal internasional dan dijadikan sebagai sumber data utama penelitian ini yang bersumber dari database scopus. Review artikel menggunakan aplikasi Vosviewer. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa trend penelitian demokrasi lokal saat dari tahun 2021-2024 mengalami penurunan. Penelitian tentang demokrasi lokal merupakan salah satu topik yang menarik banyak perhatian ahli dan telah menjadi subjek diskusi yang luas. Hal ini didukung oleh sejumlah penelitian yang menyoroti ketimpangan yang masih terjadi seperti konflik masyarakat dan pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketidakmurnian demokrasi. Mengingat pertimbangan-pertimbangan ini, penting untuk memahami perkembangan penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan demokrasi lokal. Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar untuk memandu arah masa depan maka penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan penelitian. Analisis dilakukan terhadap berbagai aspek fundamental terkait konsep, dampak, dan makna demokrasi lokal yang telah dikaji sebelumnya. Keterbatasan penelitian ini adalah artikel yang digunakan hanya bersumber dari database scopus sehingga temuan penelitian tidak dapat menggambarkan secara komprehensif tentang demokrasi lokal di berbagai dunia.

Kata Kunci: Demokrasi, lokal, masyarakat, partisipasi

Pendahuluan

Meskipun pemerintah daerah telah mencapai banyak kemenangan demokrasi, pemerintah daerah masih mempunyai reputasi buruk karena kejahatan, korupsi, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya keterbukaan di beberapa bidang, seperti penetapan kontrak, keterlibatan pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran (Pires de Almeida, 2022). Demokrasi pada sektor lokal memainkan peran penting sebagai alat yang memungkinkan masyarakat melawan praktik kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan melakukan pengawasan dan berpartisipasi terhadap pelaksanaan pemerintah sudah menjadi alat yang memungkinkan memperbaiki reputasi demokrasi pada sektor lokal. Demokrasi lokal berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk responsibilitas dan kooperatif dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan memantau operasional pemerintah.

Banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang demokrasi lokal yang difokuskan pada topik dan kajian-kajian tertentu. Savirani & Wardhani (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa demokrasi lokal termasuk desentralisasi politik yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, telah berkontribusi pada strategi gerakan sosial lokal untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat lokal, dan jenis hasil yang telah mereka capai. Berargumentasi bahwa demokrasi lokal memang telah menciptakan ruang bagi warga negara dan gerakan sosial untuk menyampaikan keluhannya. Lain halnya dengan studi yang telah dilakukan oleh Dussauge-Laguna (2022) ia menjelaskan bahwa Mexico memiliki keterbatasan dalam demokrasi dan bahkan menimbulkan risiko terhadap nilai-nilai inti sistem. Meskipun pemerintah daerah telah menyadari sebagian besar risiko yang ada dan menyebabkan kerugian besar di bidang legislatif, kelembagaan, dan sosial, mereka juga telah memenuhi sebagian janjinya. Dalam penelitian lain, seperti penelitian dari Carlsson, dkk (2022) menjelaskan bahwa Penerapan *European Social Fund* (ESF) dan konsep kemitraan berdampak pada otonomi daerah yang banyak terjadi di kota-kota Swedia di Eropa. Dana Sosial (ESF) dan konsep kemitraan telah berdampak pada otonomi daerah yang terjadi di banyak kota di Swedia. Tiga bentuk pengaturan kolaboratif organisasi yang diperoleh secara eksperimental kolaborasi lokal horizontal, inisiatif regional dari bawah ke atas, dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah dipandu oleh teori tata kelola kolaboratif. Pengaturan kolaboratif organisasi kolaborasi lokal horizontal, inisiatif regional dari bawah ke atas, dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah dipandu oleh teori tata kelola kolaboratif. Hal ini menunjukkan bagaimana otonomi daerah dimungkinkan dengan diperkenalkannya ESF di kota-kota di Swedia, namun hal ini juga membatasi keterlibatan aktor-aktor publik lokal dalam proses pengambilan keputusan resmi dan internal. Hal ini dimungkinkan dengan diperkenalkannya ESF di kota-kota di Swedia. Namun, hal ini juga membatasi kekuasaan aktor publik lokal dalam proses pengambilan keputusan resmi ataupun internal.

Meskipun terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah membahas berbagai aspek tentang demokrasi lokal, masih banyak kasus yang menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun banyak literatur yang telah ada, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mendalam mengenai dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi lokal. Sebagian besar penelitian sebelumnya juga belum banyak yang mengadopsi pendekatan *systematic literature review* (SLR) dengan menggunakan artikel yang berasal dari database Scopus, serta metode review artikel yang memanfaatkan aplikasi Vosviewer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dengan melakukan review literatur menggunakan pendekatan SLR yang mengkaji 450 artikel ilmiah yang diambil dari database Scopus.

Metode *systematic literature review* (SLR) merupakan pendekatan ilmiah yang memiliki kekuatan dan kelebihan dalam mengorganisasi dan mengkaji literatur yang

ada secara sistematis, memungkinkan peneliti untuk memahami isu-isu riset berdasarkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu. SLR ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi tren penelitian, tetapi juga dalam mengevaluasi kualitas dan validitas bukti yang ada, serta dalam mengungkapkan kesenjangan penelitian yang masih ada. Dalam konteks penelitian ini, SLR dengan aplikasi Vosviewer digunakan untuk memetakan dan menganalisis pola kata kunci serta hubungan antar istilah yang berkaitan dengan demokrasi lokal, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan metode SLR dan alat analisis seperti Vosviewer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman kita tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang mungkin terabaikan dalam penelitian sebelumnya, serta untuk mengusulkan arah penelitian yang lebih inovatif dan strategis untuk masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan teoretis tentang demokrasi lokal, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mendasar, yaitu "Bagaimana implementasi demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi lokal?" Metode penelitian yang diadopsi adalah analisis kualitatif konten dengan pendekatan *systematic literature review* (SLR) dan analisis artikel menggunakan perangkat Vosviewer. Pendekatan ini dirancang untuk menyelidiki dan mengorganisasi literatur ilmiah yang relevan dari database Scopus, dengan tujuan mengungkapkan tren, kesenjangan pengetahuan, dan pola hubungan antar konsep yang berkaitan dengan demokrasi lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan yang terfokus pada demokrasi lokal, kebersihan, dan aspek kebebasan dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Dengan menggunakan metode SLR dan alat analisis seperti Vosviewer, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. Pemahaman ini tidak hanya bermanfaat secara teoretis, tetapi juga praktis untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam konteks demokrasi lokal.

Demokrasi lokal pada umumnya ialah tidak lain halnya dengan demokrasi pada umumnya. Namun yang menjadi pembeda dari demokrasi lokal ini ialah sektoral yang dicakup oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pada sistem demokrasi lokal ini. Patologi demokrasi lokal tidak hanya tefokus dari kesalahan penyelenggarapemerintahandaerah saja. Namun juga bisa timbul dari ulah masyarakat itu sendiri yang kurang memahami sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat juga menjadi penentu jalannya roda demokrasi pada sektor daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Callaghan & Horne (2023) yang mana pada penelitiannya justru sedang

mengalami kekurangan atau apatisme masyarakat terhadap lingkungan dan sekitarnya. Pada penelitiannya Callaghan & Horne juga menjelaskan ada salah satu organisasi yaitu "Gerakan partisipasi publik yang baru" yang bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan, kesenjangan, dan ketidakadilan yang terlembaga dengan meningkatkan cara kerja demokrasi dan memperluas siapa yang benar-benar berpartisipasi.

Demokrasi lokal ini juga terkadang tidak berjalan secara baik yang disebabkan oleh penyelenggara kebijakan atau pemerintahan daerah itu sendiri. Hingga mengakibatkan perbedaan sikap masyarakat terhadap demokrasi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan paparan terhadap perubahan besar dalam bidang politik dan kelembagaan, seperti transisi demokrasi dan desentralisasi fiskal/politik (De Mello, 2021). Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadikan sebuah acuan yang perlu dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. Karena hal ini sangat krusial bagi keberlangsungan dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rabbiosi (2022) di negara Itali ini justru bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di negara-negara lain. Demokrasi lokal bisa saja tidak berjalan dengan baik yang dipicu oleh warisan budaya. Tentunya di suatu daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi, dalam konteks demokrasi lokal ini seharusnya tidak menjadi sebuah perdebatan. Dikarenakan budaya yang diwariskan yaitu etnografi yang berbasis di Forlì, Italia, di mana pemerintah daerah telah mendukung proses *Faro* dari tahun 2016 hingga 2018. Namun hal ini justru memicu adanya perdebatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Sebuah penelitian terbaru telah mengungkapkan potensi yang menjanjikan dari demokrasi lokal sebagai sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga dalam menjadikan sistem demokrasi yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan memperkuat demokrasi lokal, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mempengaruhi arah pembangunan di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi lokal bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga alat penting untuk mempromosikan inklusi, keadilan, dan kemajuan komunitas secara keseluruhan.

Sebagai acuan penemuan baru ini ialah tidak sedikitnya daerah-daerah di negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi masih mengalami atau menghadapi ketertutupan dalam berdemokrasi. Demokrasi lokal seharusnya menggunakan kaidah-kaidah demokrasi yang benar tanpa memandang dari aspek manapun. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Gerber & Brincat (2021) yang mana ia telah melakukan penelitian tentang Transformasi Gerakan Kebebasan Kurdi menuju Konfederalisme Demokratis. Hal ini dipicu karena adanya peralihannya dari Marxis-Leninisme, nasionalisme, dan statisme, menuju komunalisme dan mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi proses revolusioner ini. Lalu pada penelitian Huijsmans (2023) menjelaskan bahwa warga di wilayah pedesaan dan pinggiran di negara-negara demokrasi maju menunjukkan tingkat ketidaksukaan yang lebih tinggi terhadap

lingkungan mereka. Mereka merasa bahwa daerah mereka diabaikan oleh para elit politik, tidak menerima alokasi sumber daya yang adil, dan nilai-nilai yang mereka anut diabaikan oleh warga dari daerah lain. Ketidaksukaan terhadap tempat tersebut dianggap sebagai persepsi atas ketidaksetaraan sosial ekonomi, budaya, dan politik, seperti yang diakui dalam literatur. Hingga pada penelitian yang dilakukan oleh Béal, dkk (2023) menyatakan bahwa pada skala lokal, krisis ini memicu ketidakselarasan antara masyarakat perkotaan dan partai politik yang mendukung agenda kewirausahaan. Hal ini menjadi syarat munculnya kotamadya baru, yang terbentuk dari aliansi sosial baru yang kompleks dan kontradiktif.

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Winsvold, dkk (2023) justru hal ini bukan hanya disebabkan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Melainkan dipicu oleh para politisi daerah mereka. Winsvold, dkk tidak menemukan efek dari delegasi dalam jangka waktu yang panjang, tetapi ada dampak yang tidak menguntungkan dari delegasi dalam jangka pendek. Ini mengindikasikan bahwa para politisi memiliki fokus waktu yang lebih pendek daripada yang diasumsikan oleh teori *New Public Management* (NPM) tentang kepemimpinan politik yang strategis. Dampak negatifnya menjadi lebih buruk ketika anggota dewan berinteraksi dengan masyarakat, menunjukkan bahwa delegasi jangka pendek tidak memberi ruang bagi politisi untuk merespons masukan dari masyarakat. Hal itu tentunya akan menjadi akar penyakit pada sistem demokrasi. Dikarenakan adanya pemicu yaitu delegasi dari politisi yang dirasa kurang baik oleh masyarakat. Pada penelitian lainnya juga menemukan hal baru dalam demokrasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Smith & Johnson (2023) menjelaskan bahwa peran teknologi dalam memperkuat partisipasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi katalisator penting dalam meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi lokal. Dengan adopsi platform- platform daring dan alat-alat digital lainnya, warga dapat lebih mudah terlibat dalam diskusi, pemungutan suara, dan pengawasan terhadap kebijakan lokal. Dalam penelitian yang ditemukan oleh Brown & Garcia (2022) pentingnya keragaman dalam representasi politik dikarenakan studi-studi terkini menyoroti pentingnya memperjuangkan representasi politik yang inklusif dan beragam di tingkat lokal. Melalui keterwakilan yang mencerminkan beragam identitas dan perspektif, demokrasi lokal dapat lebih mewakili kebutuhan dan aspirasi dari seluruh komunitas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Levesque, dkk (2024) tentang pembangunan kapasitas dan pendidikan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan pemahaman politik warga merupakan faktor penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Program-program pendidikan politik dan pelatihan keterampilan partisipasi politik dapat meningkatkan kualitas partisipasi warga dalam proses pembuatan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Wang & Lee (2024) transparansi dan akuntabilitas institusi lokal. Penelitian ini justru menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintahan lokal. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja publik dapat memperkuat legitimasi dan

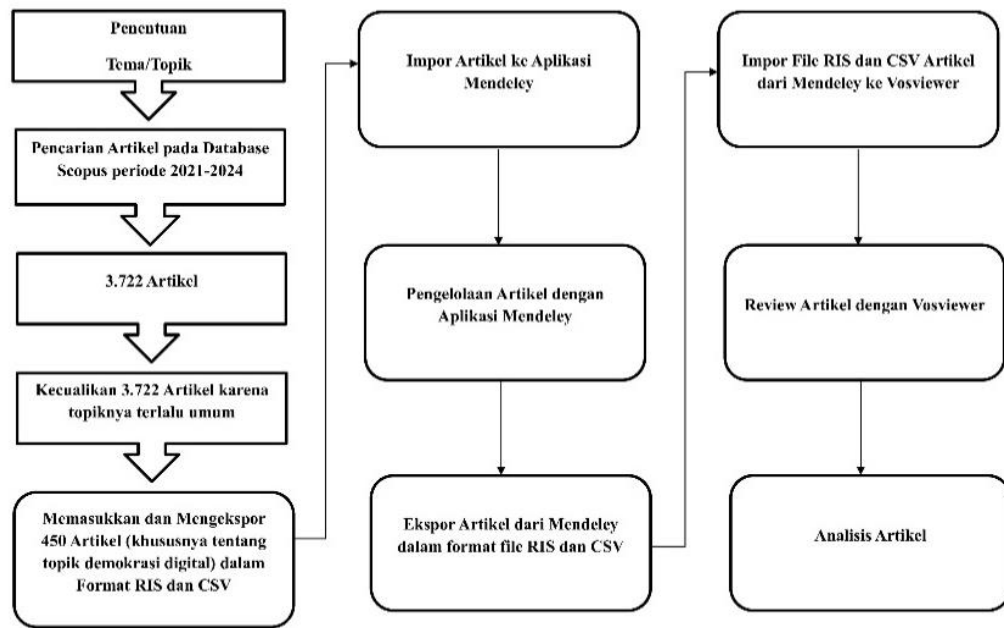
kredibilitas pemerintah lokal. Dan penelitian yang dilakukan oleh Miller & Evans (2022) tentang kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah. Studi-studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memperkuat demokrasi lokal dengan memobilisasi sumber daya yang beragam dan meningkatkan akses terhadap informasi serta partisipasi masyarakat. Dan penelitian yang dilakukan oleh Chen & Kim (2024) menjelaskan tentang kebijakan inklusif untuk merespons tantangan global. Penelitian terbaru menekankan perlunya kebijakan lokal yang responsif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketimpangan ekonomi. Demokrasi lokal yang inklusif harus mampu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan mengintegrasikan perspektif-perspektif beragam dan mengadopsi pendekatan-pendekatan inovatif.

Konsep penelitian yang kuat dibangun melalui konsep dan hasil penelitian sebelumnya. Kerangka penelitian ini akan memperhitungkan ide-ide krusial yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya mengenai demokrasi lokal, termasuk kontribusi, kebebasan berdemokrasi, dan partisipasi masyarakat. Saat menyusun kerangka penelitian, peneliti akan menggabungkan temuan-temuan signifikan dari penelitian terdahulu. Misalnya, ditemukan bahwa demokrasi lokal sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, peneliti dapat merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih spesifik dan relevan.

Selain itu, kerangka penelitian akan mempertimbangkan metodologi yang tepat untuk mendalami demokrasi lokal. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan penyelidikan lebih dalam terhadap konflik yang muncul dalam sektor demokrasi lokal. Konsekuensinya, demokrasi lokal yang kuat memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, sementara demokrasi yang lemah atau cacat dapat menghasilkan ketidakpuasan, konflik, dan ketidaksetaraan yang lebih besar (Ringholm, 2022). Oleh karena itu, penelitian dalam demokrasi lokal bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, efektivitas lembaga-lembaga lokal, dan kualitas keputusan yang dihasilkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas setempat.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah artikel yang membahas isu-isu yang terkait dengan demokrasi lokal. Artikel-artikel tersebut berasal dari jurnal internasional dan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Analisis dilakukan terhadap berbagai aspek dasar permasalahan yang berkaitan dengan konsep, dampak, dan signifikansi demokrasi lokal yang telah diteliti sebelumnya.



Gambar 1. Tahapan Penelitian (di olah 2024)

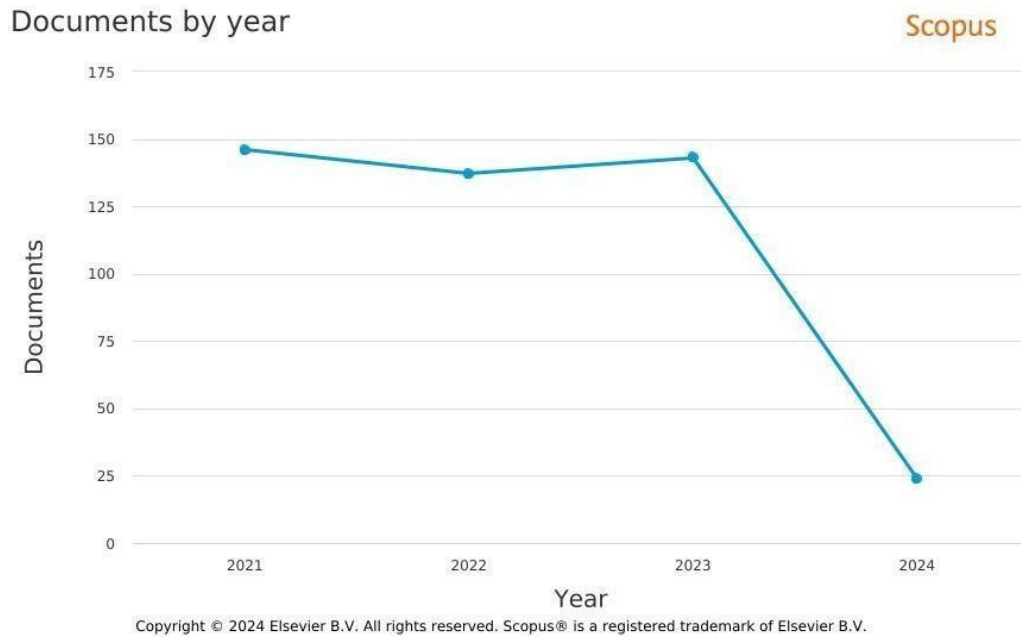
Penulis merangkum berbagai pertanyaan mendasar sebagai panduan dalam menganalisis tema-tema utama yang diangkat. Database SCOPUS digunakan sebagai sumber utama untuk mencari artikel-artikel yang relevan dengan konteks negara dan masyarakat sipil. Setelah melakukan pencarian, penulis mengidentifikasi 3722 artikel yang relevan dengan kata kunci "Demokrasi Lokal" dengan rentang waktu tahun 2021 hingga 2024. Proses selanjutnya melibatkan verifikasi terhadap artikel-artikel tersebut guna menyaring yang paling relevan dengan kajian tentang demokrasi lokal, yang menghasilkan 450 artikel/jurnal yang dianggap sangat relevan dengan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kajian mengenai demokrasi lokal merupakan salah satu bidang penelitian yang memikat perhatian banyak pakar serta menjadi subjek diskusi yang intensif dalam berbagai forum akademis. Fenomena ini ditunjang oleh sejumlah penelitian yang menyoroti berbagai ketimpangan yang masih terjadi dalam praktik demokrasi lokal, seperti konflik yang timbul antara masyarakat dan pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta adanya berbagai bentuk ketidakmurnian dalam implementasi demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks ini, memahami perkembangan penelitian atau karya ilmiah yang berfokus pada demokrasi lokal menjadi sangat krusial. Penelitian-penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai masalah-masalah yang ada, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat mengarahkan perbaikan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk melacak dan mengevaluasi perkembangan terkini dalam kajian demokrasi lokal agar dapat menyediakan panduan yang tepat bagi pengembangan

kebijakan dan praktik demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, penelitian mengenai demokrasi lokal memiliki signifikansi besar dalam membentuk arah masa depan demokrasi, menjadikannya bidang studi yang penting dan relevan untuk ditelaah secara mendalam.



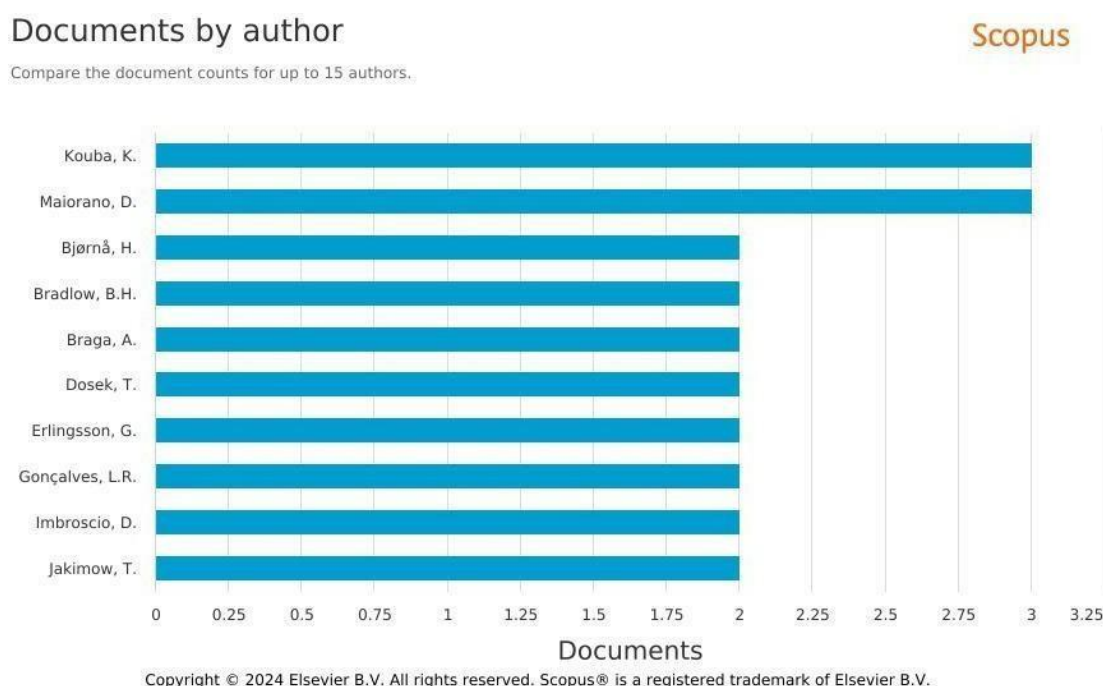
Gambar 2. Jumlah Dokumen Berdasarkan Tahun Penerbitan (Scopus)

Gambar 2 mengilustrasikan bahwa jumlah dokumen yang membahas topik demokrasi lokal mengalami fluktuasi pada periode tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 150 dokumen yang diterbitkan, sementara pada tahun 2024 hanya terdapat 25 dokumen yang diterbitkan. Penurunan jumlah artikel ilmiah mengenai demokrasi lokal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam penelitian pada topik tersebut saat ini. Fenomena ini mungkin mencerminkan bahwa para penulis memiliki

minat yang lebih rendah dalam mengkaji aspek-aspek demokrasi lokal dalam karya ilmiah mereka.

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan jumlah dokumen yang dihasilkan oleh penulis, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3. Data ini penting untuk diperhatikan karena memberikan informasi mengenai penulis mana yang memiliki kontribusi paling signifikan dalam menulis artikel tentang demokrasi lokal. Diskusi mengenai penulis juga mencakup topik atau bidang keahlian penulis tersebut dalam studi tentang demokrasi lokal. Semakin dominan suatu topik yang dibahas oleh seorang peneliti, semakin menunjukkan bahwa peneliti tersebut memang fokus pada aspek tersebut dalam penelitiannya.

Analisis mendalam mengenai jumlah dokumen yang diterbitkan serta kontribusi individu penulis sangat penting dalam memahami dinamika penelitian tentang demokrasi lokal. Hal ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tren minat penelitian, tetapi juga membantu mengidentifikasi peneliti-peneliti yang menjadi motor utama dalam pengembangan studi ini. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan penelitian demokrasi lokal dapat diperoleh melalui analisis data penerbitan dan kontribusi penulis yang tersaji dalam gambar-gambar tersebut.



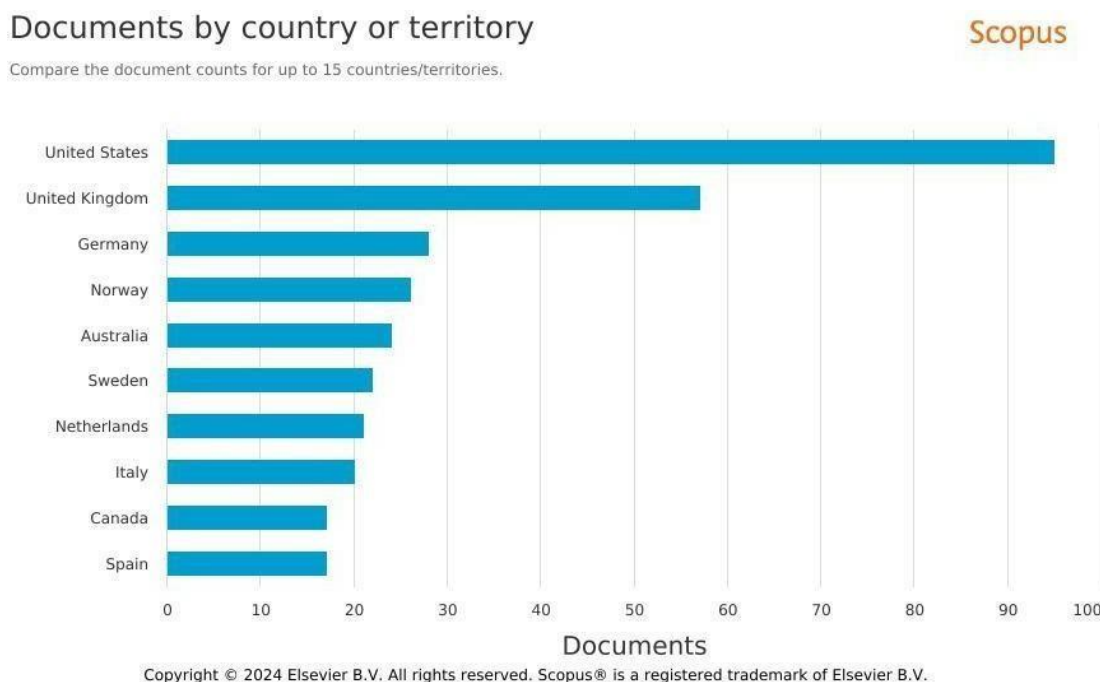
Gambar 3. Jumlah Dokumen menurut Penulis (Scopus)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Gambar 3, terdapat sepuluh penulis teratas yang telah menerbitkan minimal dua dokumen yang berkaitan dengan topik demokrasi. Di antara penulis-penulis tersebut, nama Kouba, K dan Maiorano, D muncul sebagai

penulis dengan jumlah dokumen terbanyak yang diterbitkan dalam konteks ini. Salah satu karya tulis Kouba, K berjudul "Mendemokratisasikan Pemerintahan Perkotaan melalui Batasan Masa Jabatan Walikota: Bukti Eksperimental dari Reformasi di Kota-kota di Chili." Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar karya tulis Kouba, K berfokus pada studi mengenai demokrasi lokal, kebebasan berdemokrasi, partisipasi masyarakat, dan pemilihan umum.

Di sisi lain, Maiorano, D juga merupakan penulis yang produktif dalam bidang ini, dengan salah satu karyanya yang berjudul "India 2022: Penyesuaian Politik dalam Sistem yang Didominasi BJP," yang mengkaji tentang politik di India dan perkembangan demokrasi melalui dinamika politik tersebut. Kedua penulis ini, dengan karya-karya mereka yang signifikan, telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan pengembangan studi tentang demokrasi.

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada negara atau wilayah yang berkontribusi, baik sebagai objek penelitian maupun sebagai lokasi di mana setiap dokumen diterbitkan. Analisis ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang negara atau wilayah mana yang aktif dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema demokrasi lokal. Selain itu, informasi ini juga dapat menjadi referensi yang berharga untuk penelitian-penelitian selanjutnya, agar dapat lebih bervariasi dalam memilih objek dan lokasi penelitian. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kontribusi individu penulis, tetapi juga tentang distribusi geografis penelitian yang ada, yang pada gilirannya dapat memperkaya perspektif dalam studi demokrasi lokal.



Gambar 4. Jumlah Dokumen menurut Negara atau Wilayah (Scopus)

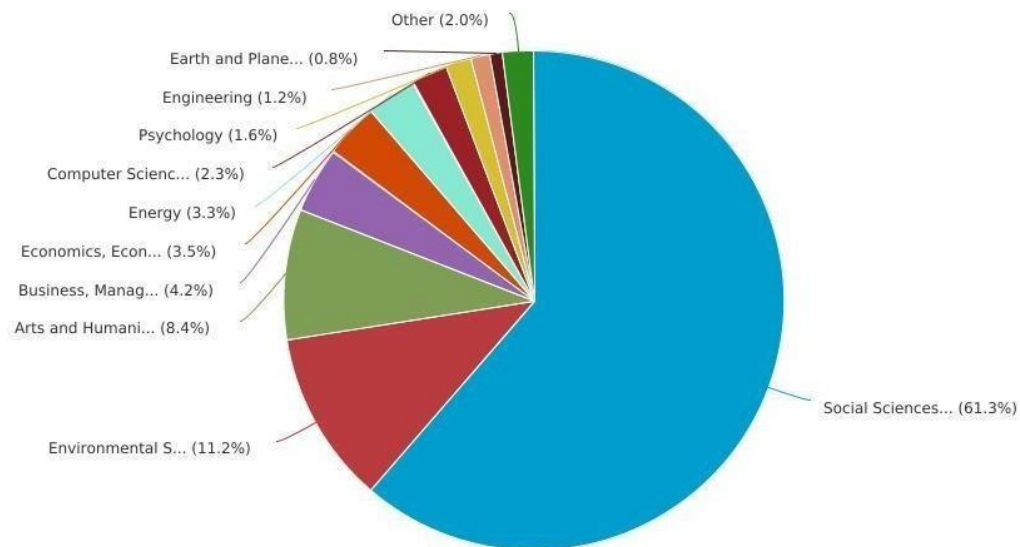
Berdasarkan gambar 4 di atas, negara atau wilayah yang tercantum menunjukkan tingkat keterlibatan tertinggi baik sebagai objek penelitian maupun sebagai lokasi publikasi, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dari hasil pencarian, Amerika Serikat menduduki posisi tertinggi dengan 95 dokumen yang diterbitkan, diikuti oleh Britania Raya dengan 68 dokumen, dan Jerman yang berada di posisi ketiga dengan 38 dokumen. Data ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang paling aktif dalam meninjau dan mengkaji berbagai jenis penelitian tentang demokrasi lokal.

Aktivitas penelitian yang tinggi di Amerika Serikat mengindikasikan bahwa negara ini memiliki minat dan komitmen yang kuat terhadap studi mengenai demokrasi lokal. Hal ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam memahami, menganalisis, dan mengembangkan praktik demokrasi lokal yang lebih baik. Sebagai akibatnya, penelitian-penelitian yang dihasilkan dari Amerika Serikat dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur global tentang demokrasi lokal.

Situasi ini seharusnya menjadi perhatian bagi negara-negara lain, mendorong mereka untuk lebih aktif dalam meningkatkan volume dan kualitas penelitian tentang demokrasi lokal. Negara-negara lain perlu mempertimbangkan untuk menambah sumber daya dan dukungan untuk penelitian dalam bidang ini, guna memastikan bahwa mereka juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman global tentang demokrasi lokal. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan negara-negara lain dalam penelitian demokrasi lokal akan membantu memperkaya perspektif dan pemahaman kolektif, serta mendorong praktik-praktik demokrasi yang lebih inklusif dan efektif di seluruh dunia..

Documents by subject area

Scopus



Copyright © 2024 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

Gambar 5. Persentase Jumlah Dokumen menurut Bidang Subjek (scopus)

Berdasarkan data yang tercantum dalam Gambar 5, wilayah subjek penelitian yang berkaitan dengan demokrasi lokal didominasi oleh bidang-bidang ilmu sosial, ilmu lingkungan, seni, dan kemanusiaan. Jumlah besar dari subjek-subjek dalam ranah ini mengindikasikan kompleksitas yang sangat besar dalam pembahasan atau topik mengenai demokrasi lokal, serta keterkaitannya yang luas dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Bidang ilmu sosial, khususnya, menonjol sebagai subjek yang paling sering diteliti oleh para peneliti yang tertarik, hal ini terkait dengan kompleksitas isu-isu yang melibatkan berbagai aspek masyarakat dalam konteks negara demokratis, dan oleh karena itu merupakan topik yang penting untuk dikaji baik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka mengidentifikasi serta memecahkan berbagai masalah yang ada.

Keterlibatan yang signifikan dalam bidang ilmu sosial sebagai subjek utama dalam studi demokrasi lokal mencerminkan minat yang besar dalam memahami dinamika demokrasi dalam konteks lokal. Hal ini sejalan dengan pentingnya pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya.

Analisis mendalam selanjutnya akan difokuskan pada penggambaran jaringan kata kunci terkait dengan topik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi ketebalan dan dampak dari studi yang berkaitan dengan demokrasi lokal. Penelitian ini akan melalui serangkaian proses seleksi yang cermat untuk memastikan penciptaan pemetaan yang akurat dan efisien, dengan memanfaatkan alat

kelompok data. Melalui representasi grafis yang menggunakan warna berbeda untuk setiap kelompok, peneliti dapat dengan jelas mengidentifikasi dan merujuk pada kelompok konsep yang saling terkait. Gambar 6 menunjukkan bahwa terdapat total 84 kata kunci yang sering digunakan dalam studi tentang demokrasi lokal. Tabel 1 memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai pengelompokan kluster dari kata kunci untuk penelitian tentang demokrasi lokal, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap struktur dan dinamika dalam literatur ilmiah mengenai topik tersebut.

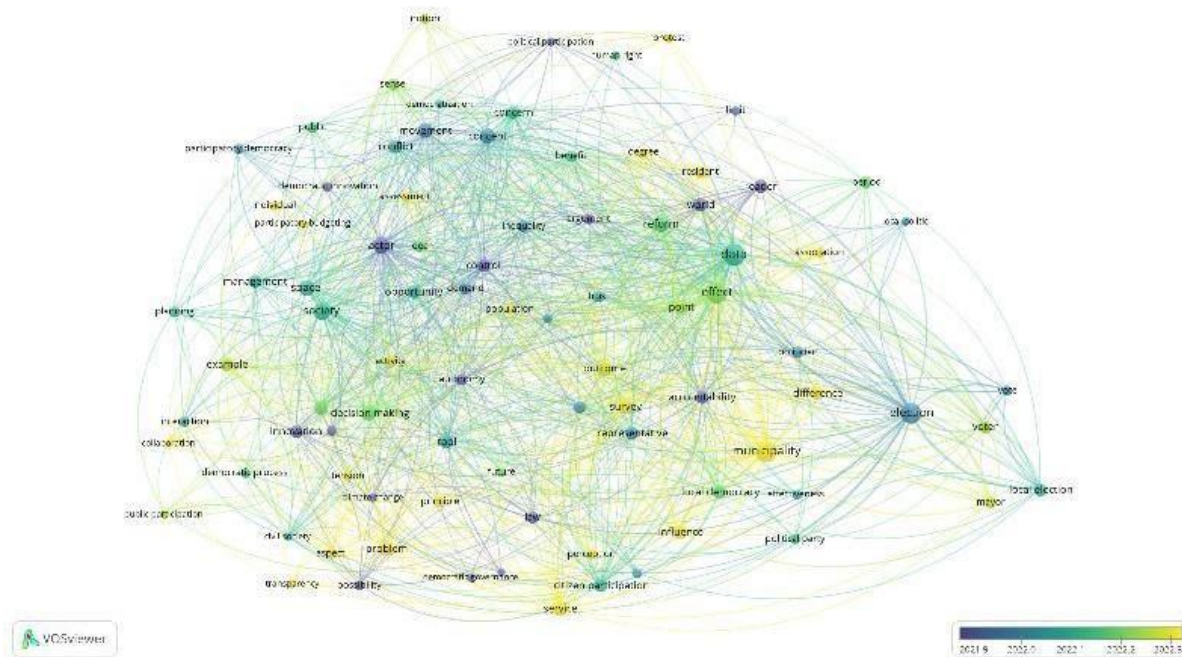
Tabel 1. Tema dikelompokkan berdasarkan Kluster

Kelompok	Konsep	Total
Kluster 1	Actor, idea, control, opportunity, space, management, society, planning, example, activity, autonomy, decision making, innovation, interaction, collaboration, demoratic process, tension, tool, future, climate change, public participation, civil society, aspect, problem, principle, law, governance, democratic,possibility, transparancy	30
Kluster 2	Effect, data, reform, leader, period, local politic, politician, difference, election, vote, representative, municapality, voter,local election, mayor, political party, influence	18
Kluster 3	Movement, nation, political participation, human right, protest, sense, democratization, concern, limit, concept, conflict, public, participatory democracy, democratic innovation, individual, participatory bugeting, argument, demand, point	19
Kluster 4	Assessment, benefit, degree, resident, world, inequality, association, population, trust, outcome, survey, accountability,local democracy, effectiveness, perception, citizen participation, service	17

Sumber: Data diolah 2024

Dari berbagai kata kunci yang telah diidentifikasi dan terklasifikasi ke dalam kluster-kluster tertentu, dapat dilihat bahwa ini merupakan fokus utama dalam studi tentang demokrasi lokal. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi analisis data dengan penyajian visual yang sistematis, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mendalami lebih dalam tentang karakteristik dan pola yang mungkin terdapat dalam masing-masing kluster tersebut. Setiap kluster mencerminkan sekelompok kata kunci yang memiliki hubungan tematik atau konseptual yang kuat, mencakup berbagai aspek penting dalam pembahasan mengenai demokrasi lokal seperti partisipasi masyarakat, proses politik, kebebasan berdemokrasi, dan dampak sosial-politik dari kebijakan publik.

Pembahasan berikutnya akan mengulas peta perkembangan penelitian untuk menganalisis distribusi tahun penerbitan dari berbagai kata kunci penelitian yang ada. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana prioritas penelitian terhadap berbagai aspek demokrasi lokal telah berkembang seiring waktu. Gambar 7 menampilkan distribusi kata kunci berdasarkan tahun penerbitannya, di mana penggunaan simbol- simbol yang berbeda dengan gradasi warna dari terang hingga gelap membedakan perubahan waktu dalam fokus penelitian. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tren perubahan dalam literatur akademis mengenai demokrasi lokal, tetapi juga memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana isu-isu spesifik telah diangkat dan dikaji secara lebih intens dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian, analisis ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang evolusi dan dinamika penelitian dalam konteks demokrasi lokal, serta relevansinya terhadap tantangan dan perubahan sosial-politik yang terus berkembang di berbagai negara dan wilayah.



Gambar 7. Peta Perkembangan berdasarkan Kata Kunci (vosviewer)

Analisis yang terdapat dalam Gambar 7 mengungkapkan hasil peta perkembangan berdasarkan kata kunci yang dilakukan menggunakan VosViewer. Peta ini memperlihatkan keberadaan 15 kelompok utama yang menjadi fokus utama dalam referensi kata kunci pada tahun 2022. Kelompok-kelompok ini mencakup beragam kata kunci seperti *servey*, *municipality*, *influancen*, *perception*, *service*, *principle*, *problem*, *aspect*, *transparency*, *collaboration*, *activity*, *difference*, *association*, *resident*, dan *degree*. Keberadaan dan penekanan pada kata kunci-kata kunci ini mencerminkan relevansi yang masih tinggi dalam konteks studi tentang demokrasi lokal.

Pembahasan selanjutnya akan mengulas tingkat kepadatan masing-masing kata

Artikel ini didasarkan pada penggunaan 450 artikel yang berasal dari Scopus, yang digunakan oleh penulis untuk mendukung penulisan artikel ini dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan, "Bagaimana pelaksanaan demokrasi lokal serta partisipasi masyarakat terhadap demokrasi lokal?" Demokrasi lokal merujuk pada sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat dan dilaksanakan di tingkat lokal, seperti di tingkat kota, kabupaten, atau wilayah kecil lainnya. Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam konteks demokrasi lokal, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat signifikan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Cakupan partisipasi masyarakat dapat bervariasi, meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, pertemuan komunitas, forum diskusi, atau kegiatan lain yang memungkinkan warga untuk mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan lokal. Pendekatan ini mempertimbangkan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai salah satu elemen kunci dalam membangun dan memperkuat demokrasi lokal, yang secara efektif dapat mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang diharapkan dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Namun penelitian yang dilakukan oleh Butzlaff (2023) justru bertentangan dengan penelitian terdahulu. Yang mana hal ini diperkuat sebab Butzlaff menyatakan bahwa peningkatan partisipatif berdemokrasi yang dilakukan oleh warga sudah baik. Namun, peningkatan permintaan untuk demokratisasi juga disertai dengan meningkatnya kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan negara-negara demokrasi perwakilan dalam memastikan kebijakan yang efektif.

Keterlibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat adalah konsep yang sering kali dianggap sebagai aspek krusial dalam menjaga kelangsungan hidup sosial (Guziana, 2021). Roda demokrasi tidak mungkin bisa berjalan jika tidak didampingi atau diselaraskan dengan partisipasi. Partisipasi itu juga berangkat dari masyarakat itu sendiri, namun adakalanya pemerintah juga menjadi penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Penelitian yang dilakukan Agger (2021) mengkaji tentang "demokrasi hibrida" yang mana hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk inovasi kelembagaan kota "komite sementara" yang terdiri dari anggota dewan yang terpilih dan warga yang ditunjuk. Tujuannya yaitu untuk bekerja sama merancang strategi baru dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Disini dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat dan tanggapan dari pemerintah daerah berjalan dengan selaras. Keselarasan ini mewujudkan demokrasi lokal yang baik. Karena masyarakat dan pemerintah daerah berinteraksi dan bersinergi untuk kepentingan bersama.

Demokrasi yang terjadi pada Indonesia, khususnya di daerah Banyumas, Provinsi Jawa Tengah ini cukup unik. Sebabnya, dalam kehidupan demokrasi di masyarakat setempat, terdapat praktik demokrasi yang unik dan menarik (Sadeli & Nasiwan, 2023). Konsep pendidikan demokrasi yang terjadi di daerah Banyumas, Jawa Tengah masih terfokus pada interpretasi demokrasi yang hanya terbatas pada proses pemilihan umum. Namun, nilai-nilai fundamental demokrasi sebenarnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mayoritas individu merasa puas dengan praktik nilai-nilai demokrasi, terutama dalam hal kebebasan, seperti kebebasan beragama, berkumpul, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Hingga pada akhirnya penelitian Sadeli & Nasiwan (2023) ingin menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi tidak melulu melalui pendidikan formal. Akan tetapi, melalui budaya dan adat istiadat yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman masyarakat lokal terhadap nilai-nilai demokrasi.

Maka pelaksanaan demokrasi lokal secara penelitian yang dikaji oleh para peneliti dari belahan manca negara, banyak menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan demokrasi lokal tergolong sudah baik. Namun, hal ini tidak bisa terlepas dari dinamika yang terjadi. Selama pelaksanaan demokrasi tentunya banyak faktor yang menyebabkan penghambatan dalam menjalankan demokrasi. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Folkestad, dkk (2021) yang mana dewan kota memberikan opsi berupa referendum konsultatif di tingkat lokal di Norwegia mengenai penggabungan kota, yang menggunakan pedoman yang disediakan oleh Komisi Venesia untuk referendum. Meskipun telah memenuhi banyak standar demokrasi, penggunaan kata-kata dalam pertanyaan dan opsi dalam surat suara dalam beberapa kasus dapat menimbulkan masalah, yang pada akhirnya mengurangi nilai demokratis dari partisipasi warga.

Bagaimanapun pelaksanaan demokrasi tingkat pusat ataupun tingkat lokal pada akhirnya menemukan dinamikanya masing-masing. Pemicunya pun juga beragam seperti halnya partisipasi publik yang lemah menjadikan ketidaksabitan roda demokrasi, perbedaan pendapat dalam masyarakat, persaingan politik antar kelompok, perubahan kebutuhan dan harapan warga, serta dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah. Faktor-faktor ini sering kali bersangkutan satu sama lain, memengaruhi tata kelola lokal dan arah kebijakan, serta memicu pergeseran dalam kekuatan politik di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap dinamika yang terjadi dalam rangka memelihara keseimbangan dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi demokrasi lokal masih menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi penerapan pemerintahan daerah yang demokratis. Fenomena ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk aspek pemerintahan, partisipasi masyarakat, budaya lokal, dan kebijakan publik yang berlaku. Temuan ini menandakan penemuan baru dalam konteks demokrasi lokal, mengingat adanya variasi pelaksanaan demokrasi di berbagai negara yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai fondasi utama dari negara yang menerapkan prinsip pemerintahan demokratis. Namun, partisipasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi lokal. Hak-hak ini mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, hak memilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek kebijakan publik. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi tingginya tingkat skeptisisme terhadap lembaga pemerintahan di banyak negara. Demokrasi lokal pada

dasarnya merupakan sistem pemerintahan di mana keputusan politik dan administratif dibuat oleh warga di tingkat lokal atau daerah, melalui proses partisipatif dan representatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Dengan mengidentifikasi pola partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah (LSM), dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah politik dan pemerintahan, dengan fokus khusus pada partisipasi masyarakat, demokrasi, dan fenomena sosial yang termasuk dalam cakupan humaniora. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan kritis yang lebih mendalam terhadap efektivitas mekanisme partisipasi yang ada, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dan inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, analisis dilakukan dengan memanfaatkan data yang hanya berasal dari database Scopus, sehingga kekurangan data pembandingan dari sumber lain seperti *Web of Science* (WoS) dapat mempengaruhi akurasi dan keseluruhan pemahaman penelitian. Maka dari itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan analisis komparatif yang melibatkan sumber-sumber referensi yang lebih luas dan beragam, serta memperluas rentang waktu dalam mengevaluasi publikasi yang menjadi sumber utama analisis.

Referensi

- Agger, A. (2021). Democratic innovations in municipal planning: Potentials and challenges of place-based platforms for deliberation between politicians and citizens. *Cities*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103317>
- Béal, V., Maisetti, N., Pinson, G., & Rousseau, M. (2023). When Bookchin faces Bourdieu. French 'weak' municipalism, legitimation crisis and zombie political parties. *Urban Studies*, 60(11), 2195–2213. <https://doi.org/10.1177/00420980231153344>.
- Brown, L., & Garcia. (2022). Promoting Diversity in Local Political Representation. *Local Politics Review*, 3(15), 122–129.
- Butzlaff, F. (2023). Consenting Participation? How Demands for Citizen Participation and Expert-Led Decision-Making Are Reconciled in Local Democracy. *Political Studies Review*, 21(2), 340–356. <https://doi.org/10.1177/14789299221091884>.
- Callaghan, K. A., & Horne, R. (2023). The Dynamics of Local Participation. *American Behavioral Scientist*, 67(4), 476–491. <https://doi.org/10.1177/00027642221086950>.

- Carlsson, V., Mukhtar-Landgren, D., & Fred, M. (2022). Local autonomy and the partnership principle: Collaborative governance in the European Social Fund in Sweden. *Public Money and Management*.
<https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2076516>.
- Chen, H., & Kim, Y. (2024). Inclusive Policies for Local Democracy: Addressing Global Challenges at the Grassroots Level. *Journal of Local Development*, 1(18), 32–49.
- De Mello, L. (2021). Population ageing and local governments: Does engagement with the local community change over the lifecycle? *Local Government Studies*, 47(3), 364–385. <https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1802253>.
- Dussauge-Laguna, M. I. (2022). The promises and perils of populism for democratic policymaking: the case of Mexico. *Policy Sciences*, 55(4), 777–803. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09469-z>.
- Folkestad, B., Klausen, J. E., Saglie, J., & Seggaard, S. B. (2021). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. *International Political Science Review*, 42(2), 213–228. <https://doi.org/10.1177/0192512119881810>.
- Gerber, D., & Brincat, S. (2021). When Öcalan met Bookchin: The Kurdish Freedom Movement and the Political Theory of Democratic Confederalism. *Geopolitics*, 26(4), 973–997. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1508016>.
- Guziana, B. (2021). Only for citizens? Local political engagement in Sweden and inclusiveness of terms. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/su13147839>.
- Huijsmans, T. (2023). Why some places don't seem to matter: Socioeconomic, cultural and political determinants of place resentment. *Electoral Studies*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102622>.
- Levesque, V. R., Bell, K. P., & Johnson, E. S. (2024). The role of municipal digital services in advancing rural resilience. *Government Information Quarterly*, 41(1). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101883>.
- Miller, D., & Evans, S. (2022). Collaborative Governance: Enhancing Local Democracy through Government-NGO Partnerships. *Journal of Collaborative Governance*, 2(5), 150–168.
- Pires de Almeida, M. A. (2022). Innovations in the Portuguese local government: contributions for local democracy. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 98, 137–158. <https://doi.org/10.7458/SPP20229819846>.
- Rabbiosi, C. (2022). The frictional geography of cultural heritage. Grounding the Faro Convention into urban experience in Forlì, Italy. *Social and Cultural Geography*, 23(1), 140–157. <https://doi.org/10.1080/14649365.2019.1698760>.
- Ringholm, T. (2022). Energy citizens – Conveyors of changing democratic institutions? *Cities*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103678>
- Sadeli, E. H., & Nasiwan, D. (2023). Democracy Education In The Sociocultural Perspective Of Indonesian Society. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.368>.
- Savirani, A., & Wardhani, I. S. (2022). Local social movements and local democracy: tin

- and gold mining in Indonesia. *South East Asia Research*, 30(4), 489–505. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2022.2148553>.
- Smith, J., & Johnson, A. (2023). The Role of Technology in Strengthening Public Participation in Local Democracy. *Jurnal of Local Governance Studies*, 2(10), 45–62.
- Wang, Q., & Lee, S. (2024). Building Capacity for Local Democracy: Lessons from Political Education Programs. *Journal of Civic Engagement*, 1(8), 78–94.
- Winsvold, M., Zeiner, H. H., & Stokstad, S. (2023). Short- and long-term delegation: what are the effects on politicians' sense of control? *Public Management Review*, 25(3), 620–636. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1988271>.